

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tetap menjadi isu sentral pembangunan yang menggambarkan ketimpangan sosial-ekonomi suatu bangsa. Bappenas menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan nasional menurun dari 13,33 persen pada 2010 menjadi 9,20 persen pada 2023 (Putri, 2023), angka ini belum mencerminkan keberhasilan menyeluruh karena disparitas antardaerah masih tajam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Lingkaran Setan Kemiskinan (Nurkse, 1953) menjelaskan bahwa pendapatan rendah menimbulkan keterbatasan tabungan, investasi, dan produktivitas, sehingga masyarakat terus terjebak dalam kemiskinan struktural. Untuk memutus siklus ini diperlukan kebijakan makroekonomi yang terpadu pengeluaran pemerintah yang efektif, investasi swasta yang produktif, serta peningkatan mutu sumber daya manusia.

Kerangka teoritik pembangunan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas SDM merupakan tiga pilar utama yang saling memperkuat dalam menurunkan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, hubungan kausal di antara ketiganya sering tidak konsisten karena perbedaan arah kebijakan fiskal, struktur industri, dan distribusi modal antarwilayah. Fakta ini menimbulkan kesenjangan empiris yang perlu diuji secara sistematis melalui pendekatan kuantitatif, agar dapat menjelaskan bagaimana interaksi ketiga faktor tersebut memengaruhi tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.



Penelitian ini penting karena menyediakan analisis komprehensif mengenai efektivitas kebijakan publik dan peran sektor swasta terhadap pengentasan kemiskinan di era desentralisasi fiskal. Dengan mengintegrasikan teori Keynes, Solow, dan Becker, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana kebijakan fiskal, investasi produktif, dan pembangunan manusia berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat mengisi celah literatur mengenai keterkaitan simultan antara faktor-faktor makroekonomi tersebut di Indonesia.

Penyerapan tenaga kerja menjadi saluran vital yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Okun's Law menjelaskan adanya hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di Indonesia, pertumbuhan 5 persen per tahun belum sepenuhnya mengurangi pengangguran karena dominasi sektor informal. Fenomena jobless growth mengindikasikan bahwa penciptaan output tidak diimbangi perluasan kesempatan kerja (Siregar & Wahyuniarti, 2008). Inilah salah satu alasan penelitian ini menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel mediasi utama.

TPAK nasional meningkat menjadi 70,63 persen pada 2023, tetapi sebagian besar pekerja masih berada di sektor berproduktivitas rendah. Kondisi ini memperlemah transmisi pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas memerlukan sinergi antara kebijakan pengeluaran publik dan investasi swasta dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dengan demikian, analisis jalur dalam penelitian ini diharapkan dapat

kan mekanisme bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi an melalui pasar tenaga kerja



Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga merupakan indikator efektivitas pembangunan manusia. Mutu SDM yang tinggi meningkatkan kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, variabel ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial karena mencerminkan keberhasilan pembangunan inklusif.

Melalui pendekatan empiris, penelitian ini berupaya menjawab apa faktor dominan yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, untuk apa hubungan ini dimediasi dalam model kemiskinan, dan mengapa penguatan kapasitas tenaga kerja menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu negara meningkatkan output barang dan jasa secara berkesinambungan. Berdasarkan teori Solow (1956), pertumbuhan ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun menunjukkan stabilitas makro, tetapi belum menjamin penurunan kemiskinan yang signifikan apabila distribusi pendapatan tidak merata (Kuncoro, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menelaah peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi yang menyalurkan pengaruh kebijakan fiskal, investasi, dan kualitas SDM terhadap kemiskinan.

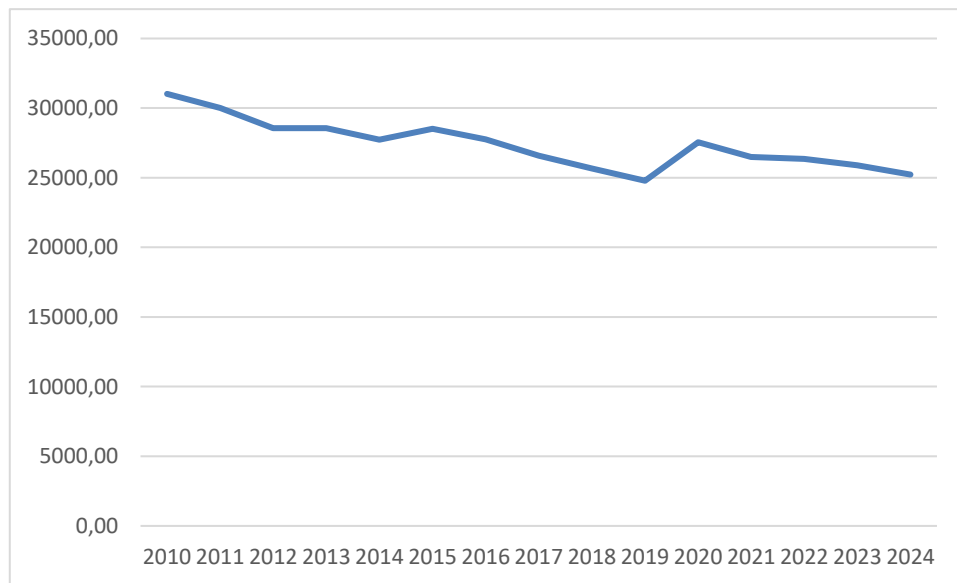
Dari sisi teori Keynesian, belanja pemerintah yang ekspansif dapat meningkatkan permintaan agregat dan menstimulasi produksi. Namun, peran sektor swasta tetap krusial untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Ketidakseimbangan antara keduanya berpotensi menghasilkan pertumbuhan yang secara regional. Dengan demikian, penting untuk menilai sejauh



mana kombinasi pengeluaran publik dan investasi swasta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, mutu SDM berperan memperkuat kapasitas produksi dan inovasi, menjadikan pertumbuhan lebih berkelanjutan. Analisis dalam penelitian ini menekankan hubungan simultan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab apa bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, untuk apa variabel ini dijadikan mediasi dalam model analisis jalur, dan mengapa pemahaman terhadap mekanisme pertumbuhan menjadi penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang pro-kemiskinan.



Sumber : BPS Indonesia, 2025

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



— berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan dinamika jumlah penduduk miskin di a selama kurun waktu 2010–2024. Secara umum, tren yang terbentuk hatkan penurunan gradual jumlah penduduk miskin dalam jangka

panjang, meskipun terdapat beberapa fluktuasi moderat pada tahun-tahun tertentu.

Pada awal periode (2010–2011), jumlah penduduk miskin berada pada kisaran di atas 30 juta jiwa, namun grafik menunjukkan kecenderungan menurun secara konsisten hingga sekitar 2017. Penurunan ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, serta peningkatan akses publik terhadap pelayanan dasar.

Selanjutnya, pada periode 2018–2019 terjadi penurunan lanjutan hingga mencapai titik terendah sekitar 25 juta jiwa. Namun, memasuki tahun 2020, jumlah penduduk miskin kembali meningkat signifikan, yang terlihat dari lonjakan grafik. Kenaikan pada tahun tersebut sangat mungkin berkaitan dengan guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang menurunkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan pengangguran, dan memperluas kerentanan sosial.

Setelah puncak kenaikan tahun 2020, grafik menunjukkan tren penurunan kembali pada 2021–2024, meskipun lajunya relatif moderat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin berada pada kisaran sekitar 25 juta jiwa, menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi dan efektivitas intervensi pemerintah melalui program pemulihan sosial-ekonomi, termasuk bantuan tunai, subsidi, dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Secara keseluruhan, pola grafik memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang,

tersebut masih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama krisis kesehatan dan ekonomi. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan



yang berorientasi pada ketahanan sosial, penguatan perlindungan sosial adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal utama yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan memperluas kesejahteraan sosial. Menurut Keynes (1936), peningkatan belanja publik di sektor produktif dapat menstimulasi permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan belanja publik berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah masih menjadi perdebatan. Penelitian Ilyas (2019) dan Suwardi (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak selalu signifikan menurunkan kemiskinan karena sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja rutin. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya tentang besarnya anggaran, tetapi bagaimana efisiensi dan kualitas alokasinya.

Dalam kerangka penelitian ini, pengeluaran pemerintah dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian ini dapat menguji apakah kebijakan fiskal Indonesia telah berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi pendapatan.

Penelitian ini penting karena menjawab apa pengaruh nyata belanja publik kemiskinan, untuk apa kebijakan fiskal dianalisis dalam hubungan kausal



yang kompleks, dan mengapa kualitas pengeluaran publik menentukan efektivitas strategi pembangunan sosial-ekonomi nasional.

Investasi swasta adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan teori neoklasik (Solow, 1956), peningkatan investasi meningkatkan stok modal dan output nasional. Dalam konteks Indonesia, investasi swasta tumbuh pesat pascareformasi birokrasi dan menjadi kontributor utama PDB (BKPM, 2024). Penelitian Pateda et al. (2019) serta Najmi et al. (2024) menunjukkan bahwa investasi swasta menurunkan kemiskinan secara signifikan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, distribusi investasi masih sangat timpang. Konsentrasi modal di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menciptakan kesenjangan regional. Di sisi lain, wilayah timur dengan sumber daya alam melimpah justru menghadapi keterbatasan infrastruktur dan SDM terampil. Kondisi ini menjelaskan mengapa investasi swasta belum berdampak merata terhadap pengentasan kemiskinan nasional.

Dalam model penelitian ini, investasi swasta dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti peningkatan investasi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan jawaban terhadap apa peranan investasi swasta dalam mengurangi kemiskinan, untuk apa sektor swasta sebagai variabel strategis dalam model, dan mengapa pemerataan



investasi menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Mutu SDM merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Teori Human Capital (Becker, 1964) menegaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan kesehatan adalah bentuk investasi produktif yang meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Peningkatan kualitas SDM memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan perubahan teknologi, memperluas peluang kerja, dan mendorong inovasi ekonomi.

Secara empiris, nilai IPM Indonesia naik dari 66,53 pada 2010 menjadi 73,12 pada 2024 (Bappenas, 2024). Namun, kesenjangan antarprovinsi tetap besar; DKI Jakarta mencapai 81,45 sedangkan Papua hanya 60,97. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum merata dan masih menjadi kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam penelitian ini, mutu SDM dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi kualitas SDM, semakin besar kemampuan masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab apa kontribusi kualitas SDM terhadap pengurangan kemiskinan, untuk apa pendidikan dan keterampilan diposisikan sebagai variabel strategis dalam model makroekonomi, dan mengapa peningkatan mutu SDM menjadi prasyarat terciptanya pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teoritis yang telah dijelaskan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh mutu sumber daya manusia terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh mutu sumber daya manusia terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

Rumusan masalah ini mengarahkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menguji secara empiris bagaimana interaksi antara kebijakan fiskal, peran sektor dan kualitas sumber daya manusia dapat memengaruhi tingkat an, baik secara langsung maupun melalui dua jalur mediasi utama yakni



penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel secara parsial, tetapi juga menyeluruh dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh investasi swasta terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh mutu sumber daya manusia terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh investasi swasta terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
6. Menganalisis dan menguji pengaruh mutu sumber daya manusia terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



uan penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan apa determinan kemiskinan di Indonesia, untuk apa instrumen kebijakan fiskal, investasi,

dan pembangunan SDM dikaji secara simultan, serta mengapa keterpaduan ketiga faktor tersebut melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja menjadi penting dalam memperkuat strategi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara kebijakan fiskal, investasi swasta, mutu sumber daya manusia, dan kemiskinan. Temuan empiris yang diperoleh dapat memperkaya literatur yang menguji relevansi Teori Keynesian tentang peran pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Model Pertumbuhan Solow (1956) tentang akumulasi modal dan produktivitas ekonomi, serta Teori Human Capital (Becker, 1964) yang menekankan pentingnya kualitas manusia dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini memperkuat bukti empiris terkait mekanisme pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai jalur transmisi (mediating variables) antara kebijakan makroekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian pada isu ketimpangan dan pembangunan inklusif di negara berkembang.

1.4.2 Kegunaan Praktis (Kebijakan dan Penerapan)



Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan

pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Bagi pemerintah pusat dan daerah, penelitian ini memberikan landasan empiris mengenai pentingnya alokasi pengeluaran publik yang berorientasi produktif seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan struktural.

Bagi sektor swasta dan investor, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengoptimalkan peran investasi produktif untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di berbagai wilayah. Sedangkan bagi lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan tenaga kerja, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan mutu SDM dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

1.4.3 Kegunaan bagi Pembangunan Nasional

Secara makro, penelitian ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama “No Poverty” dan tujuan kedelapan “Decent Work and Economic Growth.” Temuan penelitian diharapkan menjadi dasar empiris dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan pro-poor dan peningkatan kapasitas manusia, sekaligus mendukung agenda nasional untuk memperkuat daya saing ekonomi berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan merata



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kegunaan Penelitian

2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks ekonomi pembangunan, Nurkse, (1953) mengemukakan teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*) yang menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat self-perpetuating atau memperkuat dirinya sendiri melalui interaksi antara faktor ekonomi dan non-ekonomi. Menurut Nurkse, rendahnya pendapatan menyebabkan tabungan yang terbatas, investasi yang rendah, produktivitas yang minim, dan akhirnya pendapatan kembali rendah. Pola ini membentuk lingkaran yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan pemerintah yang bersifat struktural dan strategis.

Pada sisi penawaran (*supply side*), masyarakat miskin tidak mampu menabung atau berinvestasi dalam kegiatan produktif karena rendahnya pendapatan. Hal ini menghambat akumulasi modal dan pembentukan kapasitas produksi nasional. Di sisi permintaan (*demand side*), pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan konsumsi terbatas, sehingga permintaan agregat terhadap barang dan jasa juga rendah. Kondisi ini menurunkan insentif investasi sektor swasta dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ekonomi terjebak dalam low-level equilibrium trap suatu keadaan di mana pendapatan dan produktivitas tetap rendah dari waktu ke waktu (Meier & Baldwin,



Faktor non-ekonomi juga berperan memperkuat lingkaran kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan menyebabkan produktivitas tenaga kerja menurun, sedangkan lemahnya kelembagaan ekonomi memperburuk akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar. Sebagaimana ditegaskan oleh Todaro, (2015), kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan individu, melainkan hasil dari struktur ekonomi yang timpang. Dengan demikian, pendekatan pengentasan kemiskinan harus mencakup perbaikan struktural melalui kebijakan fiskal, investasi publik, dan penguatan kapasitas manusia.

Dalam konteks Indonesia, teori Nurkse sangat relevan untuk menjelaskan persistensi kemiskinan di daerah tertinggal, khususnya di wilayah timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses modal, serta sumber daya manusia yang rendah (Bappenas, 2024). Upaya pemerintah untuk memutus lingkaran ini dilakukan melalui program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan penyertaan modal desa. Namun, efektivitas program tersebut masih terbatas jika tidak diimbangi peningkatan produktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, teori Lingkaran Setan Kemiskinan menjadi dasar teoritik penting dalam penelitian ini. Hubungan antara pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan mutu sumber daya manusia terhadap kemiskinan dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk memutus siklus kemiskinan struktural. Peningkatan investasi publik dan kualitas manusia diharapkan memperkuat produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.



2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan kerangka konseptual utama yang menjelaskan bagaimana perekonomian mengalami peningkatan kapasitas produksi dari waktu ke waktu. Dalam pandangan ekonomi klasik, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776) dan David Ricardo (1817), pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan produktivitas tenaga kerja. Smith menekankan pentingnya pembagian kerja (division of labor) dalam meningkatkan efisiensi produksi, sementara Ricardo menyoroti keterbatasan lahan dan hukum hasil yang menurun (law of diminishing returns) sebagai faktor penghambat pertumbuhan jangka panjang. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa investasi merupakan motor penggerak utama yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Teori klasik kemudian dikembangkan oleh Harrod (1939) dan Domar (1946) melalui model Harrod-Domar Growth Model yang menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh rasio tabungan terhadap modal (capital-output ratio). Semakin tinggi tingkat investasi dan efisiensi penggunaan modal, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Model ini menjadi dasar kebijakan pembangunan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan fokus pada peningkatan investasi publik dan swasta untuk mempercepat pertumbuhan.

Selanjutnya, Solow, (1956) memperkenalkan teori pertumbuhan neoklasik yang memasukkan unsur kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen yang menentukan pertumbuhan jangka panjang. Dalam model Solow, investasi tetap penting, tetapi pengaruhnya bersifat sementara karena adanya diminishing returns

. Oleh karena itu, pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inovasi, peningkatan teknologi, dan penguatan kualitas sumber daya



manusia. Teori ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara investasi fisik dan modal manusia sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan negara berkembang, peran investasi menjadi sangat strategis. Investasi swasta berperan memperluas kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja, sementara investasi publik berfungsi menciptakan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa distribusi investasi yang merata akan memperlebar kesenjangan pendapatan dan menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, investasi yang inklusif dan berkeadilan menjadi elemen penting dalam memperkuat fondasi pertumbuhan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik memberikan dasar konseptual untuk memahami hubungan antara investasi, pertumbuhan, dan kemiskinan. Peningkatan investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, diharapkan tidak hanya meningkatkan output nasional, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat produktivitas masyarakat. Dalam penelitian ini, teori ini menjadi kerangka utama dalam menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kebijakan fiskal, investasi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Keynesian memberikan dasar teoretis yang kuat bagi analisis peran pemerintah dalam perekonomian modern. Dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (Keynes, 1936), John Maynard Keynes menunjukkan bahwa dalam kondisi resesi atau depresi, pasar tidak mampu



mencapai keseimbangan penuh tenaga kerja karena lemahnya permintaan agregat. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan aktif melalui kebijakan fiskal ekspansif yaitu meningkatkan pengeluaran publik untuk menstimulasi permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian. Ketika pemerintah membelanjakan dana untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian memperbesar konsumsi dan investasi sektor swasta. Proses ini menciptakan efek berantai yang meningkatkan output nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, teori Keynesian menjelaskan mengapa belanja publik di sektor produktif dapat menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya (Musgrave & Musgrave, 1989).

Keynes juga menekankan bahwa komposisi pengeluaran lebih penting dibandingkan jumlahnya. Belanja pemerintah yang diarahkan ke sektor konsumtif tidak akan menghasilkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dapat memperbesar kapasitas produksi dan memperkuat basis ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan pandangan *Wagner's Law*, bahwa seiring meningkatnya pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah akan meningkat secara proporsional karena meningkatnya kebutuhan layanan publik dan kesejahteraan sosial (Wagner, 1958).

Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pemerintah telah menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui program Pemulihan Nasional (PEN) dan Dana Desa. Namun, sebagaimana dikemukakan



oleh Salman & Ikbal (2025), efektivitas pengeluaran publik terhadap pengurangan kemiskinan masih bergantung pada efisiensi pelaksanaannya dan arah kebijakan daerah. Pengeluaran yang tidak produktif atau tidak terarah pada kelompok miskin berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, teori Keynesian menjadi dasar konseptual penelitian ini dalam menilai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Secara teoritis, pengeluaran publik di sektor produktif mampu menurunkan kemiskinan secara langsung melalui distribusi pendapatan dan secara tidak langsung melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang efektif diharapkan menjadi katalis utama pembangunan inklusif di Indonesia.

2.1.4 Teori Modal Manusia

Teori modal manusia dikembangkan oleh Vaizey & Schultz, (1972) dan Pyatt & Becker, (1966) yang menjelaskan bahwa pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini berangkat dari premis bahwa sumber daya manusia bukan sekadar faktor produksi, tetapi juga aset ekonomi yang menghasilkan nilai tambah jangka panjang. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan efisiensi kerja, sementara kesehatan memperpanjang masa produktif tenaga kerja. Kedua aspek ini saling memperkuat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menurunkan kemiskinan.

Pyatt & Becker, (1966) menekankan bahwa individu yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan analitis, teknis, dan manajerial yang lebih baik sehingga berpeluang memperoleh pendapatan lebih tinggi. Investasi dalam pendidikan menghasilkan private return bagi individu dan social return bagi masyarakat. Dalam konteks makro, peningkatan mutu sumber daya manusia



memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui peningkatan efisiensi dan inovasi. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi syarat fundamental bagi negara berkembang untuk keluar dari perangkap kemiskinan.

Jacob Mincer (1974) memperluas teori ini dengan memperkenalkan fungsi pendapatan Mincerian yang menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pendapatan. Setiap tambahan satu tahun pendidikan meningkatkan pendapatan individu secara signifikan, menunjukkan bahwa pendidikan adalah mekanisme mobilitas sosial vertikal yang efektif. Vaizey & Schultz, (1972) juga menegaskan bahwa perbaikan kesehatan masyarakat, terutama gizi dan pelayanan kesehatan dasar, merupakan investasi yang memiliki dampak ekonomi besar dalam jangka panjang.

Dengan demikian, teori modal manusia menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena menjelaskan mekanisme bagaimana mutu SDM dapat menurunkan kemiskinan baik secara langsung melalui peningkatan pendapatan, maupun tidak langsung melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Teori ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan manusia bukan hanya sasaran moral, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2.2 Hubungan Antarvariabel Penelitian

2.2.1 Teori Modal Manusia. Hubungan Teoritis Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Tingkat Kemiskinan

Secara teoritis, pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Dalam an Keynes, (1936), peningkatan belanja publik dapat merangsang an agregat dan menumbuhkan lapangan kerja, terutama pada kondisi



ketika perekonomian mengalami perlambatan. Belanja pemerintah yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor riil. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah menjadi salah satu mekanisme efektif dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan.

Hubungan ini juga dijelaskan oleh Musgrave dan Musgrave (1989) melalui fungsi alokasi dan distribusi belanja negara. Belanja pemerintah berfungsi mengalokasikan sumber daya ke sektor yang tidak efisien secara pasar, seperti pembangunan infrastruktur publik dan layanan sosial, yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat memperbaiki distribusi pendapatan melalui program subsidi, transfer sosial, dan investasi padat karya. Dalam konteks Indonesia, program Dana Desa dan padat karya tunai merupakan contoh implementasi nyata teori ini yang bertujuan memperkuat basis ekonomi pedesaan dan mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja langsung.

Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan sangat ditentukan oleh komposisi dan efisiensi belanja. Suwardi (2012) dan Ilyas (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang didominasi oleh belanja rutin dan administratif tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, pengeluaran yang diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur dasar dan pendidikan terbukti memiliki korelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi

berperan sebagai katalis dalam menciptakan kesempatan kerja dan atkan pendapatan masyarakat miskin.



Selain dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi nasional akibat investasi publik, perekonomian memperoleh dorongan pertumbuhan yang lebih kuat. Proses ini memperluas pasar tenaga kerja dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka teori pembangunan inklusif, pengeluaran pemerintah menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat, tetapi juga merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan bersifat timbal balik dan dinamis. Belanja publik yang tepat sasaran meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sementara peningkatan kesempatan kerja menurunkan kemiskinan secara langsung melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2.2.2 Hubungan Teoritis Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Tingkat Kemiskinan

Investasi swasta merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian karena memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan output dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik Solow (1956), peningkatan investasi menyebabkan akumulasi modal dan peningkatan produktivitas yang secara langsung mendorong ekspansi sektor-sektor ekonomi.

Dalam konteks negara berkembang, investasi swasta sangat penting dalam membuka peluang kerja baru di sektor industri, manufaktur, dan jasa, yang secara



signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja bersifat positif dan kuat. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa investasi yang padat karya berkontribusi langsung terhadap pengurangan pengangguran. Ketika perusahaan menanamkan modal dalam produksi barang dan jasa, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat. Penyerapan tenaga kerja ini menjadi mekanisme utama transmisi dari investasi menuju penurunan kemiskinan. Namun, efektivitas hubungan tersebut bergantung pada struktur investasi. Investasi padat modal dengan penggunaan teknologi tinggi dapat meningkatkan output tetapi tidak selalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sedangkan investasi padat karya memiliki efek yang lebih inklusif terhadap masyarakat miskin.

Selain efek langsung terhadap kesempatan kerja, investasi swasta juga berperan secara tidak langsung dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pateda et al. (2019) menemukan bahwa investasi swasta di Indonesia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di sektor industri kecil dan menengah. Hasil serupa dikemukakan oleh Najmi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa investasi di sektor manufaktur memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan melalui perluasan kapasitas produksi.

Namun demikian, distribusi spasial investasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sebagaimana dicatat oleh Utami dan Aisyah (2021), investasi swasta

masih terpusat di wilayah dengan infrastruktur dan sumber daya yang lebih baik, seperti Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan kesenjangan



regional dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, hubungan antara investasi swasta dan kemiskinan dapat optimal hanya apabila investasi tersebar merata dan diarahkan pada sektor padat karya di wilayah tertinggal.

Oleh karena itu, investasi swasta memiliki peran ganda dalam menurunkan kemiskinan langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Dalam model penelitian ini, investasi swasta diharapkan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang memperkuat daya saing ekonomi nasional dan memperluas kesejahteraan sosial.

2.2.3 Hubungan Teoritis Mutu Sumber Daya Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Tingkat Kemiskinan

Mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan determinan penting dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang kompetitif dan produktif. Berdasarkan teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961), investasi pada pendidikan, pelatihan, dan kesehatan meningkatkan kemampuan individu dalam menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. SDM yang berkualitas tidak hanya memiliki peluang kerja lebih besar, tetapi juga produktivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Kualitas SDM juga menentukan sejauh mana perekonomian dapat menyerap tenaga kerja secara efektif. Menurut Jacob Mincer (1974), pendidikan meningkatkan peluang individu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan memperoleh upah lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, peningkatan Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berkorelasi negatif dengan tingkat



pengangguran terbuka. Artinya, semakin tinggi kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka untuk terserap dalam lapangan kerja yang produktif.

Mutu SDM tidak hanya berdampak langsung terhadap kemiskinan, tetapi juga melalui penyerapan tenaga kerja sebagai variabel perantara. Wardani et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja memperkuat hubungan antara pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di provinsi-provinsi dengan tingkat pendidikan rendah. SDM yang unggul mampu mengadopsi teknologi dan mendorong produktivitas ekonomi lokal, yang pada akhirnya memperluas lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, investasi pada kesehatan juga berperan besar dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Rahmah dan Firdaus (2022) menemukan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dan penurunan kemiskinan. Dengan demikian, pengembangan modal manusia merupakan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan struktural.

Dengan demikian, hubungan teoritis antara mutu SDM, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan bersifat sinergis. SDM berkualitas meningkatkan peluang kerja, memperkuat produktivitas, dan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, mutu SDM dihipotesiskan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja.



2.2.4 Hubungan Teoritis Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan

Hubungan antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori Keynesian yang menekankan peran belanja publik dalam meningkatkan permintaan agregat dan kapasitas produksi. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan output nasional dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang (Keynes, 1936). Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas fiskal tersebut kemudian menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Musgrave (1989) menambahkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, fungsi alokasi mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, sementara fungsi distribusi memperbaiki pemerataan pendapatan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akibat belanja publik, tercipta efek ganda terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan sosial.

Penelitian empiris mendukung pandangan ini. Salman dan Ikbal (2025) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung menurunkan kemiskinan. Namun, pengaruh tersebut signifikan hanya jika komposisi belanja publik diarahkan pada sektor-sektor produktif. Sebaliknya, pengeluaran yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan memperburuk kemiskinan akibat inefisiensi fiskal.



am konteks daerah, pengeluaran pemerintah memiliki peran lebih besar
empercepat pembangunan infrastruktur ekonomi. Belanja publik daerah

yang diarahkan pada transportasi, pertanian, dan energi terbukti meningkatkan produktivitas dan akses pasar di wilayah tertinggal (Bappenas, 2024). Pertumbuhan ekonomi regional yang dihasilkan menjadi mekanisme utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui perluasan aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kualitas dan efektivitas pengeluaran publik, semakin kuat pula kontribusinya terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berorientasi pada penurunan kemiskinan.

2.2.5 Hubungan Teoritis Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan

Investasi swasta merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi terhadap pembentukan modal dan perluasan kapasitas produksi nasional. Dalam teori pertumbuhan neoklasik Solow (1956), peningkatan investasi meningkatkan stok modal yang pada gilirannya meningkatkan output dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi swasta memiliki efek berantai terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kemiskinan.

Studi empiris menunjukkan hubungan yang konsisten antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Najmi et al. (2024) menemukan bahwa peningkatan investasi swasta di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chani et al. (2022) di Asia Selatan yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan investasi produktif yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.



Namun, dampak investasi terhadap kemiskinan sangat tergantung pada jenis dan sebarannya. Investasi padat modal yang terkonsentrasi di daerah maju sering kali memperlebar ketimpangan regional. Sebaliknya, investasi padat karya dan berbasis sektor riil lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi penting untuk mendorong investasi yang berkeadilan melalui insentif fiskal dan perbaikan infrastruktur.

Selain pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi swasta juga menciptakan efek tidak langsung melalui peningkatan efisiensi teknologi dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya investasi baru, terjadi transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional, yang memperkuat potensi pertumbuhan jangka panjang.

Dengan demikian, dalam kerangka penelitian ini, investasi swasta diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan investasi swasta yang inklusif dan produktif berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.2.6 Hubungan Teoritis Mutu Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan

Mutu sumber daya manusia (SDM) memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan karena berperan sebagai faktor produksi sekaligus modal pembangunan jangka panjang. Menurut Becker (1964), pendidikan dan keterampilan merupakan bentuk investasi yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan. SDM yang berkualitas memungkinkan adopsi teknologi lebih efisien dan meningkatkan daya saing ekonomi



Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen (Romer, 1986; Lucas, 1988), modal manusia berperan sebagai sumber utama pertumbuhan berkelanjutan karena menciptakan inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Negara dengan kualitas SDM yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat kemiskinan rendah. Oleh karena itu, peningkatan mutu SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi strategi utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Penelitian empiris memperkuat teori ini. Wardani et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan mutu SDM melalui pendidikan tinggi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung menurunkan kemiskinan. Rahmah dan Firdaus (2022) menambahkan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat berperan memperkuat produktivitas dan memperpanjang masa kerja produktif.

Selain itu, peningkatan mutu SDM memperkuat efek kebijakan fiskal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. SDM berkualitas tinggi mampu mengoptimalkan penggunaan modal fisik dan teknologi yang dihasilkan dari investasi publik maupun swasta. Dengan demikian, mutu SDM memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat terhadap kemiskinan melalui saluran pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mutu SDM dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat, semakin besar kapasitas perekonomian dalam

kan pertumbuhan yang inklusif dan menurunkan tingkat kemiskinan berkelanjutan.



2.3 Kajian Empiris terdahulu

Kajian empiris terdahulu memberikan landasan ilmiah untuk memahami bagaimana faktor-faktor makroekonomi seperti pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan mutu sumber daya manusia berinteraksi dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan investasi yang diarahkan dengan baik dapat menurunkan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Uraian berikut menampilkan temuan-temuan penting dari sepuluh penelitian mutakhir (2019–2025) yang relevan dengan variabel penelitian ini.

1. Suwardi (2012) – Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia

Suwardi (2012) menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dengan data panel 33 provinsi Indonesia periode 2005–2010 untuk menilai bagaimana pengeluaran pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kemiskinan. Dampak pengeluaran publik terhadap penurunan kemiskinan muncul melalui mekanisme tidak langsung, yakni melalui peningkatan output ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Penelitian ini menegaskan pentingnya peran sektor publik dalam memperkuat infrastruktur ekonomi yang mendorong kegiatan produktif masyarakat miskin. Namun, efektivitasnya tergantung pada struktur belanja. Jika

besar dana digunakan untuk pengeluaran rutin, maka efek jangka terhadap kemiskinan akan kecil. Dengan demikian, Suwardi menegaskan



perlunya kebijakan fiskal yang lebih berorientasi produktif agar pengeluaran pemerintah dapat menjadi alat efektif dalam memutus lingkaran kemiskinan struktural di Indonesia.

2. Ilyas (2019) – Komposisi Pengeluaran Publik dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia

Penelitian Ilyas (2019) menganalisis pengaruh komposisi pengeluaran publik terhadap kemiskinan menggunakan regresi panel dinamis (GMM Arellano–Bond) dengan data provinsi tahun 2010–2018. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki dampak negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, belanja administrasi dan non-produktif tidak memberikan pengaruh berarti.

Melalui pendekatan dinamis, Ilyas menemukan bahwa pengeluaran publik memengaruhi kemiskinan terutama melalui dua jalur intervening: (1) pertumbuhan ekonomi (Y_1), karena peningkatan belanja modal mendorong produktivitas; dan (2) penyerapan tenaga kerja (Y_2), karena proyek-proyek pemerintah bersifat padat karya. Hasil ini memperkuat argumen Keynesian bahwa kebijakan fiskal ekspansif di sektor produktif mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

3. Salman dan Iqbal (2025) – Fiscal Decentralization and Poverty Reduction: Evidence from Indonesian Provinces

Studi Salman dan Iqbal (2025) memeriksa hubungan antara desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia menggunakan model efek tetap (fixed effects panel model) untuk 34 provinsi selama 2010–2023.

menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, yang tercermin dari ran pemerintah daerah, memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan



baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa efek pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan berbeda antarwilayah tergantung pada kapasitas fiskal dan efisiensi belanja publik. Provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan pengelolaan anggaran yang baik mampu menurunkan kemiskinan lebih cepat dibanding daerah lain. Dengan demikian, efektivitas pengeluaran publik dalam mengurangi kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola fiskal di tingkat daerah.

4. Pateda, Bato, & Karisoh (2019) – Investasi Swasta, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan di Indonesia

Penelitian ini menyoroti peran investasi swasta (X_2) dalam mengurangi kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja (Y_2). Dengan menggunakan data time-series nasional 1990–2018 dan metode regresi linier berganda, Pateda et al. menemukan bahwa peningkatan investasi swasta sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,35%. Pengaruh tersebut sebagian besar bekerja melalui peningkatan kesempatan kerja di sektor industri dan jasa.

Temuan ini memperkuat teori Solow (1956) yang menyatakan bahwa investasi berperan penting dalam akumulasi modal dan peningkatan output ekonomi. Selain menciptakan lapangan kerja, investasi swasta juga mendorong pertumbuhan ekonomi (Y_1), yang selanjutnya menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang mendukung investasi padat karya dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar hasil pembangunan

asakan secara luas.



5. Najmi, Firdaus, & Wibowo (2024) – Private Investment and Economic Growth: Its Effect on Poverty Reduction in Indonesia

Najmi dan rekan (2024) menggunakan model VECM (Vector Error Correction Model) dengan data triwulanan 2010–2023 untuk menganalisis keterkaitan investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Hasil jangka panjang menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan secara tidak langsung melalui mekanisme pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja.

Studi ini menegaskan bahwa peningkatan investasi swasta akan efektif menurunkan kemiskinan apabila terjadi transfer teknologi dan peningkatan produktivitas sektor riil. Dalam jangka pendek, pengaruh investasi terhadap kemiskinan relatif kecil, tetapi efek kumulatif jangka panjang sangat signifikan. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan ekonomi inklusif memerlukan stabilitas makroekonomi dan iklim investasi yang kondusif.

6. Utami & Aisyah (2021) – Spatial Distribution of Investment and Its Implication for Poverty Reduction in Indonesia

Penelitian Utami dan Aisyah (2021) menggunakan analisis spasial Geographically Weighted Regression (GWR) untuk mengevaluasi hubungan antara investasi dan kemiskinan di berbagai provinsi Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh investasi terhadap kemiskinan bervariasi secara spasial. Di wilayah dengan infrastruktur dan mutu SDM tinggi, investasi memberikan efek negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja (Y_2). Namun, di wilayah dengan kualitas SDM rendah, efek investasi

kemiskinan sangat terbatas.



Studi ini menegaskan pentingnya spatial equity dalam kebijakan investasi. Pemerataan investasi antarwilayah menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata. Investasi swasta yang bersifat padat karya di daerah tertinggal berpotensi menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

7. Wardani, Fadli, & Nurhadi (2023) – Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan: Analisis Modal Manusia di Provinsi Lampung

Wardani dan rekan (2023) meneliti pengaruh mutu sumber daya manusia (X_3) terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung menggunakan regresi panel atas 15 kabupaten/kota selama 2010–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Efek paling kuat terjadi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian ini mendukung teori Human Capital Becker (1964) yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan investasi produktif dalam jangka panjang. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan pasar kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kapasitas ekonomi keluarga miskin. Oleh karena itu, pengembangan modal manusia menjadi faktor fundamental dalam strategi pengentasan kemiskinan.

8. Rahmah & Firdaus (2022) – Health, Productivity, and Poverty Reduction in Indonesia

Rahmah dan Firdaus (2022) menggunakan Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk menilai hubungan antara kesehatan, produktivitas, dan kemiskinan data BPS 2000–2020. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan



rumah tangga, sehingga berimplikasi pada penurunan kemiskinan. Jalur utama pengaruhnya adalah penyerapan tenaga kerja (Y_2), di mana tenaga kerja sehat memiliki peluang kerja lebih besar dan durasi kerja lebih panjang.

Studi ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan kesehatan publik bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga kebijakan ekonomi. Dengan memperbaiki status kesehatan, negara memperluas kapasitas tenaga kerja produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

9. Rahardja & Wicaksono (2022) – Economic Growth, Labor Absorption, and Poverty in Indonesia: A Mediation Analysis

Penelitian Rahardja dan Wicaksono (2022) menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan data panel provinsi 2010–2020 untuk menguji mekanisme pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tetapi pengaruh tersebut sepenuhnya dimediasi oleh penyerapan tenaga kerja (Y_2). Pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja yang cukup menghasilkan fenomena jobless growth.

Studi ini memperkuat pentingnya dimensi kualitas pertumbuhan. Kebijakan ekonomi makro yang berfokus pada peningkatan PDB semata tidak menjamin kesejahteraan apabila tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja inklusif bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

10. Fazira, Sari, & Mulia (2025) – Fiscal Policy, Investment, and Human Capital: Determinants of Inclusive Growth and Poverty Reduction in Indonesia

Fazira dan kolega (2025) mengembangkan model Structural Equation (SEM) dengan data panel provinsi 2010–2024 untuk menguji pengaruh antara pengeluaran pemerintah (X_1), investasi swasta (X_2), dan mutu



SDM (X_3) terhadap kemiskinan (Y_3) dengan pertumbuhan ekonomi (Y_1) dan penyerapan tenaga kerja (Y_2) sebagai variabel intervening. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jalur paling kuat adalah pengaruh mutu SDM melalui pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh investasi melalui penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini menjadi referensi integratif yang paling mendekati model konseptual disertasi ini. Hasilnya menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang produktif, investasi yang inklusif, dan pembangunan manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia.

